



Pengentasan Kemiskinan Melalui Metode Spasial Perkotaan Dalam Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Surakarta

Ainuun Ridayanti¹, Asianto Nugroho², Rosita Candrakirana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 57126, Indonesia

Abstrak

Received: 15 Desember 2023
Revised: 29 Desember 2023
Accepted: 05 Januari 2024

Poverty is a major and underlying problem in Indonesia. Poverty is usually caused by education, income, location, health care, finances and public services. One of the processing operations is city area processing. Through a complete and independent understanding in a structured program. The Sustainable Development Goals (SDGs) state that poverty is a priority issue that needs to be addressed urgently. Solving poverty is closely linked to global goals such as clean water, sanitation, well-being and health. Poverty is also a major problem in the city of Surakarta, which is currently developing aggressively and focusing on urban spatial planning. Because the study is descriptive and qualitative, the information obtained is in the form of verbal information. As outlined in the National Long-term Development Plan (RPJN) 2005-2025 and the Regional Medium-term Plan 2021-2026 (RPJMD), developing a poverty reduction strategy is an important step in influencing sustainability. The purpose of this study is to examine urban, riverside, and suburban poverty mapping. A phenomenological approach is used to acquire primary and secondary data sources. The method of collecting data by studying the literature on documents is deductive analysis using deductive methods. The results of this study show that there are differences in urban and regional poverty rates, but they share the same indicators. Based on the information obtained, practical solutions can be implemented. Specifically, the orderly structure of settlements, the coping with unexpected disasters, the provision of sanitation services, the coping with waste pollution, the activation of natural resources (SDA), and the certification of workers in the formal sector. Increase.

Kata Kunci: Poverty, Development, Urban.

(*) Corresponding Author: ridayantiainuun@gmail.com

How to Cite: Ridayanti, A., Nugroho, A., & Candrakirana, R. (2024). Pengentasan Kemiskinan Melalui Metode Spasial Perkotaan Dalam Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Surakarta. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10470365>.

PENDAHULUAN

Kemiskinan perkotaan menjadi urgensi permasalahan yang bertalian erat dengan perubahan secara dinamis tren pembangunan perkotaan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia meningkatkan jumlah penduduk sebesar 3,4% dari 53,3% pada tahun 2015 menjadi 56,7% pada tahun 2020. Menurut data BPS, proporsi penduduk miskin yang tinggal di perkotaan sebesar 7,89% pada Maret 2021, turun menjadi 7% pada tahun 2021, dikurangi menjadi 60% September 2021. Dari data tersebut terlihat bahwa penduduk Indonesia juga dilanda kemiskinan yang berdampak pada kemiskinan perkotaan, seperti aspek fisik (akses infrastruktur dan transportasi), aspek non fisik (sosial kondisi ekonomi, ketimpangan, dan ketidakadilan), dan aspek ekologi pertimbangan banjir dan polusi). Masalah kemiskinan sering terkonsentrasi di daerah perkotaan, dan langkah-langkah untuk mengekang pertumbuhan penduduk diperlukan untuk

menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan melalui pendekatan terpadu. Kehidupan perkotaan yang berkelanjutan menjadi salah satu dari 17 tujuan global agenda tahun 2030 untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Kemiskinan dimasukkan ke dalam kerangka multidimensi dengan melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan melihat penyebab kemiskinan dari sudut yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) tahun 2005-2025 memasukkan masalah kemiskinan dalam kerangka multidimensi. Hal ini tidak hanya terkait dengan kerentanan orang atau komunitas dan kerentanan terhadap kemiskinan, tetapi juga tentang terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dan apakah ada perbedaan perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang atau tidak. kehidupan yang bermartabat.

Penyebab kemiskinan mengarah pada teori lingkaran setan kemiskinan, dimana lingkaran setan kemiskinan merupakan sekumpulan kekuatan yang saling mempengaruhi dalam suatu negara, dimana negara tersebut tetap miskin dan lebih sulit untuk mencapai tingkat yang lebih baik. tentang pembangunan. Karena sumber daya manusia terbelakang dan terbelakang (tercermin pada tingkat pendidikan), ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan produktivitas rendah dan produktivitas rendah menyebabkan pendapatan rendah. Pendapatan yang rendah mempengaruhi tabungan dan investasi yang rendah dan akumulasi modal yang rendah, sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah, dan akumulasi modal yang rendah menyebabkan keterbelakangan, dll (Marmujiono, 2014). Keberadaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai penerus *Millennium Development Goals* (MDGs) secara tidak langsung dapat membantu permasalahan negara maju dan berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs) karena sejalan dengan visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Nawacita (RPJMN) 2020-2024. Data penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir, hanya mencapai 26,16 juta jiwa pada Maret 2022 (BPS, 2022).

Kota Surakarta merupakan kota yang cukup besar di Indonesia, masalah kepadatan penduduk dan kemiskinan akan mencapai 103,9% pada tahun 2022 berdasarkan pendataan Daftar Sosial Ekonomi Kota Surakarta (Regsosek). Keberhasilan dan prakarsa pemerintah dalam pengentasan kemiskinan antara lain adalah penertiban pedagang kaki lima, skema pemukiman kembali korban banjir, dan Program Bantuan Pendidikan Daerah (BPMKS) dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Miskin (PKMS). Namun, langkah-langkah yang diambil belum sepenuhnya peka dan terintegrasi dengan aspek regional kemiskinan perkotaan, yang harus dikaitkan dengan perencanaan kota. Sayangnya, pemahaman dan pengintegrasian aspek-aspek tersebut sangat penting dalam rancangan strategis pembangunan yang dapat memberikan efek pengentasan kemiskinan, terutama di perkotaan. Memecahkan masalah kemiskinan yang kompleks membutuhkan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, dengan memahami dan mengintegrasikan aspek wilayah kemiskinan kota dan proses perencanaan kota untuk mengatasi masalah kemiskinan di kota Surakarta.

Karakteristik spasial : daerah tengah kota	Karakteristik spasial : daerah pinggir kota sekitar bantaran sungai	Karakteristik spasial : daerah pinggir untuk pengembangan baru
Lokasi : Kelurahan Kemlayan	Lokasi : Kelurahan Sangkrah	Lokasi : Kelurahan Mojosongo
Tipologi kehidupan : pekerja informal, pedagang kaki lima, pemulung, dan tukang parkir	Tipologi kehidupan : pekerja informal dan buruh harian	Tipologi kehidupan : pemulung, buruh informal, dan buruh formal

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041.

Kota Surakarta memiliki tanah yang subur karena sawah, perkebunan dan persawahan cukup diairi oleh sungai-sungai yang mengalir kota tersebut. Diantaranya adalah Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa. Itu juga dilampaui oleh Kali Anyar, Kali Pepe. dan Kali Jenes. Kota Surakarta sendiri terbagi menjadi lima kabupaten. Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Laweyan (terdiri dari 11 kelurahan), Serengan (terdiri dari 7 kelurahan), Pasar Kliwon (terdiri dari 9 kelurahan), Jebres (terdiri dari 11 kelurahan), dan Banjarsari (terdiri dari 11 kelurahan). terdiri dari 11 kecamatan). dari 13 kecamatan). Batas-batas kota Surakarta memanjang hingga Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten Karanganyar di timur, Kabupaten Sukoharjo di selatan, dan Kabupaten Sukoharjo di barat.

Tabel 2. Data Administratif Kota Surakarta 2021

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
	Serengan	Serengan	3,08	7	72	313
	Pasar Kliwon	Joyosuran	4,88	11	101	437
	Laweyan	Penumping	9,13	11	105	458
	Jebres	Jebres	14,38	10	153	651
	Banjarsari	Banyuanyar	15,26	15	195	930
Jumlah			46,72	53	626	2789

Sumber : Keadaan Geografi, Kota Surakarta Dalam Angka. BPS 2021.

Secara administratif Kota Surakarta terbagi menjadi 5 kelurahan pada tahun 2022, terdiri dari 53 kelurahan dengan 626 unit paroki pada satuan rukun warga (RW), terbagi menjadi 2.789 rukun tetangga (RT) dan terbagi menjadi 194.889 kepala keluarga (KK). Wilayah terluas berada di kecamatan Banjarsari dengan luas 15,26 km² sedangkan kecamatan Serengan merupakan yang terkecil dengan luas 3,08 km². Dari data yang telah dirinci diatas dapat dikatakan bahwa pemerataan penduduk di Kota Surakarta belum sepenuhnya menyeluruh.

Menurut Statistik pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Surakarta berjumlah 522.728.000. Kawasan Pasar Kliwon merupakan kawasan terpadat berjumlah 15.522,17 (per Km²) dengan luas 4,88 km². Hal itu diperkuat dengan data penduduk, pertumbuhan penduduk, persentase persebaran penduduk,

kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk menurut kelurahan kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 3. Data Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2021

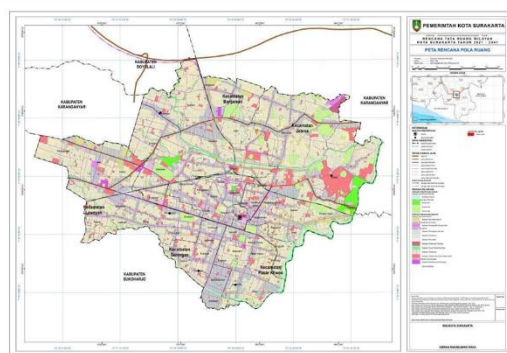
No.	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2020-2021 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Rasio Jenis Kelamin
	Serengan	47.853	0.16	9,15	9.705,64	95,31
	Pasar Kliwon	78.565	0.06	15,03	15.522,17	95,26
	Laweyan	88.578	0.06	16,95	16.094,02	98,33
	Jebres	138.859	0.06	26,56	9.658,38	97,87
	Banjarsari	168.873	0.06	32,31	11.069,13	96,58
	Jumlah	522.728	0.07	100,00	11.187,52	96,84

Sumber : Survei Penduduk 2020, BPS 2021.

b. Aspek Spasial Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan biasanya merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mewujudkan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Konsep yang digunakan oleh BPS dan beberapa negara lain adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (akses terhadap kebutuhan dasar), jadi kemiskinan adalah kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya secara finansial (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk dianggap miskin apabila rata-rata pengeluarannya per bulan per orang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang dihasilkan dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dipublikasikan BPS merupakan data makro dan hasil survei Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan proporsi penduduk miskin dari seluruh penduduk daerah (BPS, 2021). Hartono (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bukan hanya menjadi masalah negara, tetapi menjadi tanggung jawab provinsi terhadap pemerintah/kota. Berdasarkan penurunan angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Distribusi penduduk miskin dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pertama, dimana tingkat kemiskinan kabupaten/kota berada di atas tingkat provinsi dan federal. Kedua, ketika persentase kabupaten/kota di bawah persentase provinsi dan federal, dan ketiga, ketika tingkat kemiskinan kabupaten/kota di bawah persentase provinsi dan federal.

Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Kota Surakarta Tahun 2021-2041



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041.

Strategi proyek 2021-2026 dari kawasan konservasi konsep tata ruang 2021-2026 akan dilaksanakan di bawah kondisi di atas untuk mengembalikan fungsi tepi kawasan lindung lanskap (perlindungan kereta api dan sungai), menciptakan ruang berkualitas tinggi dan produktif, melestarikan dan mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) meliputi ruang dan bangunan menciptakan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan dan warisan budaya sebagai pariwisata.

Analisis kemiskinan dipilih dengan mempertimbangkan sebaran geografis dan tipologi kehidupan untuk mengungkap beberapa persoalan yang berkaitan dengan aspek regional kemiskinan perkotaan. Faktor lokal memiliki dampak penting terhadap dinamika kemiskinan dan kerentanan. Orang miskin yang tinggal di pusat kota umumnya mengalami kesejahteraan yang lebih baik daripada mereka yang tinggal di pinggiran. Pentingnya mempengaruhi konteks lokal di tengah kota meliputi kondisi infrastruktur yang relatif baik, risiko bencana yang lebih rendah dan akses yang lebih baik ke sumber daya ekonomi seperti pasar, pabrik, dan industri dapat dijangkau dengan mudah. Ruang ini dapat memberikan keuntungan dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk melindungi dan mengembangkan penghidupan. Namun, juga dapat menimbulkan ketimpangan yang terjadi di perkotaan.

c. Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Surakarta

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs)) lahir pada tahun 2012 di Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama universal yang mampu menyeimbangkan, tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk menjaga keseimbangan ketiga dimensi pembangunan tersebut, *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 5 landasan utama yaitu People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnerships bertujuan untuk mencapai tiga tujuan mulia berupa pengentasan kemiskinan pada tahun 2030 untuk mencapai prestasi. Kesetaraan dan perjuangan melawan perubahan iklim. Kemiskinan tetap menjadi isu penting dan penting, bersama dengan dua capaian lainnya. Indonesia telah berkomitmen untuk mengintegrasikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs)) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPM) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan acuan pembangunan menyeluruh yang menghubungkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sedemikian rupa sehingga pencapaian satu tujuan mendukung pencapaian tujuan lainnya. Di antara 17 tujuan tersebut, Indonesia memprioritaskan pengurangan ketimpangan dengan tujuan akhir menghapus kemiskinan dan mengurangi ketimpangan serta menyediakan layanan dasar bagi masyarakat seperti perawatan kesehatan, pendidikan, akses air bersih dan sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Sejak tahun 2012 Kota Surakarta telah berkomitmen untuk memulai *Millennium Development Goals* (SDGs) (MDGs) dan mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui 7 tujuan dan 64 indikator yang dipantau oleh pemerintah daerah. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengklarifikasi 17 tujuan dan 319 target serta menyetujui pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan masing-masing daerah untuk memantau pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* dan berusaha mengintegrasikan urusan masing-masing sektor sebaik mungkin. Kota Surakarta siap mengimplementasikan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, seperti yang disampaikan Ari Rumantara, Kepala Kantor Unicef se-Jawa, menjelaskan Surakarta sudah bisa disebut sebagai kota *SDGs*, yang dicapai dengan ditandai dengan nama seorang anak - kota yang ramah. Menurut Paramita, yang menjelaskan dalam bukunya bahwa kota yang layak huni adalah ruang yang cocok untuk segala usia, termasuk anak-anak. Indikator keberhasilan suatu kota tidak hanya kemajuannya, tetapi juga kota yang dapat memberikan kenyamanan, persahabatan, dan keamanan bagi anak-anak (Paramita Mahditia, 2014).

Surakarta merupakan satu dari lima kabupaten/kota (Kota Surakarta, Kabupaten Gorontalo, Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Kutai Kartanegara) yang menjadi pilot project pengembangan model kota layak anak oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Wujud nyata diwujudkan pemerintah daerah melalui pembangunan beberapa taman cerdas di desa Sumber, Kadipiro, Gandekan, Joyonakan, Mojosongo dan Pajang. Taman pintar memberi anak-anak tempat bermain dan sekolah dengan perpustakaan, multimedia, komputer, dan akses internet gratis (Krisnawati, 2017). Pemerintah Kota Surakarta juga telah menetapkan kampung iklim sebagai wujud *Sustainable Development Goals (SDGs)* di kecamatan Sekip Kadipiro, Sambirejo dan Ngemplak Sutan (Dewi ddk, 2019). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan instruksi pembentukan desa nasional sesuai Keputusan Pemerintah No. P.I/PP1/SET/KUM.1/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Adaptasi Desa Iklim Terhadap Perubahan Iklim. Manfaat yang dirasakan dengan terciptanya desa iklim dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, antara lain adanya peluang untuk mengurangi bencana, meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kerjasama antar lembaga, partisipasi masyarakat dan inovasi (Syarini, 2017).

Perkembangan *Sustainable Development Goals (SDGs)* berjalan cukup baik dalam memetakan empat pilar yang menjadi pedoman Kota Surakarta dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)*). Pertama, pilar pembangunan manusia meliputi pembangunan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Mengupayakan hidup sehat, pemerataan pendidikan bermutu, pendidikan inklusif, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan. Kedua, pilar pembangunan lingkungan, yang bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik, menjamin air bersih dan sanitasi untuk semua, menjamin energi berkelanjutan, mencari solusi dampak perubahan iklim, mengelola sumber daya alam dan melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ketiga, pilar ekonomi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pekerjaan yang layak, infrastruktur, industrialisasi terpadu yang inklusif, inovasi dan pembangunan pemukiman manusia yang berkelanjutan. Pilar keempat pemerintahan bertujuan untuk mengurangi perbedaan di dalam dan di luar negeri, memastikan perdamaian sosial dan mendorong kemitraan. Di antara 17 tujuan pembangunan tersebut, kemiskinan menjadi perhatian utama, karena Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)*) memuat

semua tujuan sebagai insentif dan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ujung tombak permasalahan negara, jika tingkat kemiskinan negara rendah, maka kemakmuran negara dapat dinilai baik. Kota Surakarta menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Berkelanjutan, antara lain kurangnya koordinasi antar industri, program yang belum dilaksanakan secara optimal, dan tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis sektor kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah), meningkatkan kualitas fungsi perencanaan dan mendorong pencapaian tujuan kinerja yang terukur.

d. Hubungan Aspek Spasial Kemiskinan dan Perencanaan Perkotaan

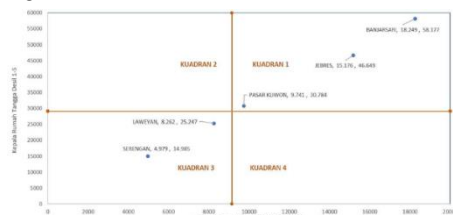
Aspek spasial sebagai gambaran dari kondisi aset penghidupan masyarakat yang tidak memadai. Hasil analisis terhadap isi dokumen perencanaan kunci Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) menunjukkan bahwa sudah terdapat perhatian terhadap kemiskinan, penggunaan data informasi tentang kemiskinan berbasis spasial, seperti sebaran penduduk miskin dan lokasi permukiman kumuh. Penggunaan data tersebut untuk perencanaan dan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. Namun, belum secara jelas menyebutkan target pengurangan angka kondisi kemiskinan. Intervensi permasalahan daerah kumuh perlu dilakukan dengan pendekatan terprogram untuk meningkatkan skala perencanaan di tingkat permukiman yang lebih terintegrasi secara signifikan. Rencana Pembangunan Tata Ruang dan Wilayah masih sangat teknis dan belum menyertakan data elemen sosial. Implikasi rencana induk perkotaan terhadap kehidupan masyarakat yang sangat besar secara khusus pada kelompok miskin. Perubahan kondisi spasial sangat berpengaruh terhadap akses kelompok miskin dalam pekerjaan, transportasi, pendidikan, dan tempat tinggal. Beberapa masalah kebijakan dan perencanaan tata ruang yang ada belum mempertimbangkan aspek spasial kemiskinan dan kerentanan. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada pengurangan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, tetapi justru menimbulkan bentuk kemiskinan dan kerentanan baru bahkan memperparah kondisi kemiskinan yang ada.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang biasa disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga. Jumlah Rumah Tangga dan anggota Rumah Tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1–5) berdasarkan data yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diambil bulan Oktober 2020 sesuai Kepmensos/146/HUK/2020. Sebaran Rumah Tangga menurut tingkat kesejahteraan Desil 1–5 Pertimbangan spasial untuk menggambarkan ketidakcukupan taraf hidup masyarakat. Hasil analisis isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dasar-dasar perencanaan wilayah dan wilayah (RTRW) menunjukkan bahwa masalah kemiskinan mendapat perhatian, penggunaan data kemiskinan daerah seperti distribusi masyarakat miskin dan tempat permukiman kumuh. Informasi ini digunakan untuk merencanakan dan mengelola program penanggulangan kemiskinan. Namun, hal itu tidak secara jelas mengungkapkan tujuan pengentasan kemiskinan. Penanganan masalah kawasan kumuh harus dilaksanakan dengan

pendekatan terprogram untuk meningkatkan cakupan perencanaan di tingkat permukiman secara signifikan. Rencana pembangunan daerah masih sangat teknis dan belum memasukkan informasi tentang unsur sosial. Dampak masterplan kota terhadap kehidupan masyarakat sangat besar, terutama bagi masyarakat miskin. Perubahan kondisi spasial berdampak signifikan terhadap lapangan kerja, mobilitas, pendidikan dan perumahan masyarakat miskin. Beberapa isu perencanaan dan kebijakan daerah yang ada belum menyentuh aspek kemiskinan dan kerentanan daerah. Hal ini tidak saja berdampak pada berkurangnya efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menimbulkan bentuk-bentuk baru kemiskinan dan kerentanan bahkan memperburuk kondisi kemiskinan yang ada.

Kesejahteraan sosial dengan kriteria yang berbeda-beda untuk setiap orang dan rumah tangga. Jumlah rumah tangga dan rumah tangga dengan kesejahteraan sosial terendah (Desil 1-5) berdasarkan informasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menurut Kepmensos/146/HUK/2020 bulan Oktober 2020. Sebaran rumah tangga menurut tingkat kesejahteraan desil . 1-5 per kabupaten kotamadya di Surakarta terbagi menjadi 2 kuadran. Kuadran 1 berarti banyak rumah tangga di subdivisi tersebut dengan anggota rumah tangga yang tingkat kesejahteraannya paling rendah yaitu 50%. Kecamatan Kuadran I adalah Kecamatan Banjarsar, Jebres dan Pasarkliwon. Sedangkan kecamatan dengan jumlah rumah tangga dan anggota keluarga terendah berada di kuadran keempat, yaitu Kecamatan Laweyan dan Serengani. berdasarkan kecamatan di Surakarta terbagi dalam 2 kuadran. Kuadran 1 bermakna kecamatan yang banyak memiliki rumah tangga dengan anggota rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 50% terendah. Kecamatan yang termasuk kuadran I yaitu Kecamatan Banjarsari, Jebres, dan Pasarkliwon. Sedangkan kecamatan dengan jumlah Kepala Rumah Tangga (KRT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) rendah berada di kuadran 4, yaitu Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan.

Gambar 3. Sebaran Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kota Surakarta Tahun 2020

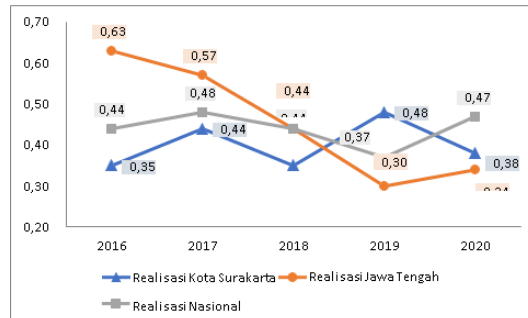


Sumber : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041.

Tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh indeks keparahan kemiskinan wilayah tersebut. Indeks Keparahkan Kemiskinan merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran tentang distribusi pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kesenjangan konsumsi antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P7) dalam lima tahun terakhir (2016-2020) di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan variabel yaitu 0,35 pada tahun 2017 kemudian meningkat menjadi 0,44 pada tahun 2017 dan menurun lagi menjadi 0,37 pada tahun 2018 kemudian meningkat. turun lagi menjadi 0,48 pada tahun 2019 dan kembali menjadi 0,38 pada tahun 2020. Tren angka

kemiskinan Kota Surakarta menurun selama setahun terakhir, berbeda dengan Jawa Tengah dan Nasional yang naik.

Gambar 4. Data Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2021

Tabel 3. Data Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2021

No.	Kecamatan	Prioritas 1		Prioritas 2		Jumlah	
		Individu	KK	Individu	KK	Individu	KK
	Serengan	260	121	3.955	1.397	4.215	1.518
	Pasar Kliwon	412	174	6.319	2.104	6.731	2.278
	Laweyan	426	176	6.263	2.137	6.689	2.313
	Jebres	822	356	8.629	2.966	9.451	3.322
	Banjarsari	1.096	473	14.464	4.869	15.560	5.342
Jumlah Total		3.016	1.300	39.630	13.473	42.646	14.773

Sumber : Dinas Sosial Kota Surakarta Tahun 2021

Tabel 4. Data Penduduk Rentan Resiko Sosial Kota Surakarta Tahun 2021

No.	Kecamatan	Prioritas 3		Prioritas 4		Prioritas 5		Prioritas 6		Jumlah	
		Individu	KK	Individu	KK	Individu	KK	Individu	KK	Individu	KK
1.	Serengan	8.883	2.831	4.594	1.461	421	127	5	2	13.903	4.421
2.	Pasar Kliwon	18.301	5.754	11.276	3.56	1.364	426	6	2	30.947	9.742
3.	Laweyan	14.107	4.497	5.575	1.701	267	84	-	-	19.949	6.282
4.	Jebres	201.482	6.648	13.909	4.377	1.328	410	1	1	35.720	11.436
5.	Banjarsari	31.099	9.820	15.353	4.593	1.089	317	7	2	47.548	14.732
Jumlah Total		92.872	29.550	50.707	15.692	42.646	1.364	19	7	148.067	46.613

Sumber : Dinas Sosial Kota Surakarta Tahun 2021

Table 5. Data Keluarga Sejahtera Kota Surakarta Tahun 2021

No.	Kecamatan	Pra Keluarga Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Jumlah
	Serengan	812	4.253	9.748	14.813
	Pasar Kliwon	1.633	3.792	9.008	14.443
	Laweyan	1.280	4.253	9.728	15.281
	Jebres	2.857	5.788	16.807	25.452
	Banjarsari	3.472	7.593	20.619	31.684

Jumlah	46,72	65.930	101.663
---------------	--------------	---------------	----------------

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2021.

e. Hubungan Perencanaan Spasial dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Pemahaman instansi terkait terhadap komponen perencanaan wilayah dan penanggulangan kemiskinan masih terbatas. Sebagian besar instansi terkait, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masih menganggap penataan ruang dan pengentasan kemiskinan sektoral sebagai sesuatu yang terpisah dan memiliki hubungan yang terbatas dengan lembaga aksi sosial seperti Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Dinas Sosial. Pendekatan Kota Surakarta dalam pengentasan kemiskinan masih berbasis program dan anggaran, sehingga belum secara langsung mempengaruhi rencana tata ruang kota. Rehabilitasi permukiman kumuh dan rumah padat penduduk merupakan bagian dari program, dan tidak ada strategi atau konsep untuk perencanaan wilayah jangka panjang.

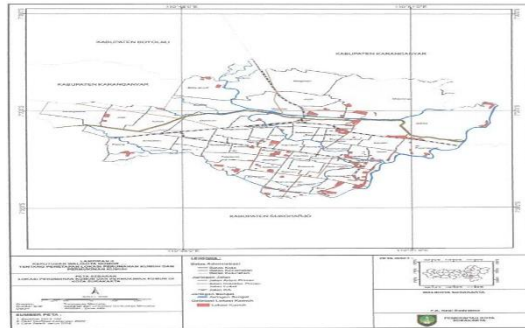
Perumahan rakyat dan kawasan perumahan merupakan salah satu topik pelayanan dasar wajib pemerintah, yang mencakup empat sub topik, yaitu perumahan, kawasan perumahan, pemukiman dan kawasan kumuh, dan sarana, prasarana, utilitas dan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan sektor. Pendaftaran kawasan pemukiman dan permukiman. Proporsi rumah tidak layak huni di Kota Surakarta semakin meningkat. Tahun 2016 sebesar 6,6%, tahun 2020 proporsi rumah tidak layak huni yang direnovasi sebesar 14,1%. Pasokan rumah layak huni meningkat, tahun 2015 sebanyak 103.457 unit apartemen dan tahun 2020 sebanyak 146.017 unit apartemen. Untuk mencapai tujuan kesebelas dari indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*, peningkatan jumlah rumah tidak layak huni menjadi perhatian, yaitu untuk menjadikan kota inklusif, aman, berkelanjutan, dan berkelanjutan. Terkait kebutuhan rumah, masih ada kerumpangan sebanyak 46.105 dan jumlah KK di Kota Surakarta sebanyak 192.764 sedangkan jumlah rumah baru sebanyak 151.659 unit.

Proporsi kawasan kumuh di Kota Surakarta mengalami penurunan. Pada tahun 2016 proporsi kawasan kumuh sebesar 6,53%, pada tahun 2020 turun menjadi 3,078%. Persentase lingkungan sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana dan fasilitas umum di Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 97,29%. Pada saat yang sama, kondisi penyediaan kuburan umum semakin memburuk, di mana proporsi kuburan umum per kapita pada tahun 2016 turun menjadi 11% pada tahun 2016 dan 11% pada tahun 2020. Pengurangan proporsi permukiman kumuh adalah sebuah keberhasilan. dalam implementasi mitigasi kawasan kumuh perkotaan dengan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Tujuan kesebelas *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah mewujudkan kota yang inklusif, aman, berkelanjutan, dan berkelanjutan. Selain itu, indikator Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan pertama cakupan rumah sehat dan indikator persentase penyediaan air minum menunjukkan hasil yang stabil pada tahun 2016–2020 dan selalu di atas 90%.

Indikator di bawah nilai target misalnya. Rumah tidak layak huni yang direnovasi (48,52%), rasio TPU terhadap unit rumah (12,09%), cakupan sanitasi rumah tangga (96,09%), persentase kawasan kumuh (3,07%), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (94,56%), persentase rumah tangga dengan

sanitasi yang memadai (86,54%), rasio TPU per unit populasi. Keterbatasan luas lahan kota surakarta membuat banyak warga mendiami lahan liar yang tidak layak huni (hunian hunian) seperti lahan tepi sungai, areal rel kereta api dan permukiman padat serta permukiman kumuh. Beberapa permukiman kumuh ini terletak di bantaran sungai sehingga mengurangi ketersediaan ruang hijau yang sudah langka di Kota Surakarta.

Gambar 5. Peta Persebaran Kumuh Di Kota Surakarta



Sumber : Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 640/69.9 Tahun 2020

Luasan kawasan kumuh di Kota Surakarta yaitu:

Tabel 6. Data Luas Kawasan Kumuh Kota Surakarta Tahun 2021

No.	Kawasan	Luas (ha)
1.	Timuran	7,022
2.	Danukusuman	8,597
3.	Tegalarjo	18,204
4.	Pucangsawit	19,131
5.	Mojosongo	20,308
6.	Semanggi	35,450
Jumlah		135,971

Sumber : Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 640/69.9 Tahun 2020

Tabel 7. Implikasi Kebijakan Perencanaan Spasial Kemiskinan

No.	Aspek Spasial Kemiskinan Perkotaan	Gambaran Aspek Spasial Kemiskinan Berbagai Lokasi			Implikasi Terhadap Perencanaan
		Daerah Tengah Kota	Daerah Pinggir Kota Sekitar Bantaran Sungai	Daerah Pinggir Kota Untuk Pengembangan Baru	
1.	Penataan dan penyediaan permukiman.	Permukiman terstruktur. Resiko bencana kebakaran di permukiman padat. Pemukiman magersari. Ruang sosial/publik terbatas	Permukiman terstruktur. Penataan kawasan pinggir sungai daerah rawan banjir.	Penyediaan permukiman layak bagi pendatang. Penataan permukiman korban banjir. Pembangunan permukiman liar daerah ilegal dan tidak layak.	Revitalisasi dan perbaikan infrastruktur. Pengaplikasian pengembangan dan pengendalian permukiman di daerah ilegal/tidak layak huni. Mitigasi dan penanggulangan

					bencana banjir serta kebakaran.
2.	Penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan sanitasi.	Akses air bersih dan sanitasi permukiman kumuh terbatas. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum maksimal.	Akses air bersih dan sanitasi permukiman kumuh terbatas. Penumpukan sampah di sungai dengan permukiman mengakibatkan pencemaran.	Kualitas air bersih dan sanitasi buruk. Belum ada sistem pengelolaan sampah terpadu di daerah permukiman illegal.	Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih di lingkungan kumuh. Pengendalian pencemaran limbah. Diperlukan sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah di permukiman kumuh
3.	Status kepemilikan lahan.	Lahan milik pribadi, keluarga, dan magersari. Penggusuran akibat menghuni lahan milik swasta/pemerintah.	Menempati lahan di sepanjang pinggir sungai Proses ganti rugi atas kepemilikan lahan pribadi.	Permukiman liar di daerah illegal dan tidak layak semakin berkembang	Legalisasi dan sertifikasi permukiman diatas lahan pemerintah/swasta. Pengendalian permukiman di daerah illegal/tidak layak huni.
4.	Integrasi perekonomian kelompok miskin.	Akses kelompok miskin terhadap lapangan pekerjaan di sektor formal terbatas	Akses kelompok miskin terhadap lapangan pekerjaan di sektor formal terbatas Degradasi Sumber Daya Alam (SDA) dan penurunan potensi ekonomi	Akses kelompok miskin terhadap lapangan pekerjaan di sektor formal terbatas Perlu kepastian kerja dan perlindungan sosial bagi buruh formal	Revitalisasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk penyesuaian kehidupan sebagai langkah transisi perekonomian Program peningkatan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk masuk dalam lapangan kerja formal

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041

f. Solusi Kebijakan

Kebijakan pengentasan kemiskinan perlu untuk ditingkatkan supaya mengurangi dampak negatif dari rencana induk perkotaan dan perubahan kondisi kehidupan masyarakat. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh lembaga terkait baik di lingkungan pemerintah maupun non-pemerintah:

- 1) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi berbasis lokasi tentang kemiskinan dan karakteristiknya sebagai dasar refleksi dalam pembuatan rencana induk perkotaan dan perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Penyadaran dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang kondisi awal kemiskinan, baik kuantitatif maupun kualitatif, dengan partisipasi aktif, dilanjutkan dengan penelitian tentang efek sosial atau prediksi perubahan kehidupan masyarakat akibat pelaksanaan pembangunan perkotaan.
- 2) Terciptanya sistem perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada kebutuhan dan kondisi kehidupan masyarakat miskin serta kerentanannya dalam konteks daerah. Mekanisme perlindungan bagi masyarakat miskin tepi sungai dan pinggiran kota harus lebih fokus pada pengurangan risiko bencana, yang berfokus pada antisipasi penurunan Kondisi Sumber Daya Alam (SDA).

Perlindungan pusat kota berfokus pada penataan permukiman ilegal, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta antisipasi penggusuran. Di daerah pinggiran kota, lebih fokus pada penataan lahan untuk pemukiman baru dan tersedianya transportasi yang murah dan memadai. Integrasi teknis kemiskinan ke dalam rencana tata ruang kota dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- 1) Mengintegrasikan data kemiskinan dengan data lokasi. Data kemiskinan terpadu dapat dijadikan acuan untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan sesuai dengan sumber daya yang ada.
- 2) Menjalin kemitraan dengan LSM atau lembaga donor untuk menciptakan inovasi Kemitraan antara Pemerintah Kota Surakarta dan organisasi Kita Kota Solo dapat berinovasi dalam penyediaan data kemiskinan berbasis wilayah untuk pembuatan rencana pembangunan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Faktor lokal memiliki dampak penting terhadap dinamika kemiskinan dan kerentanan. Orang miskin yang tinggal di pusat kota umumnya mengalami kesejahteraan yang lebih baik daripada mereka yang tinggal di pinggiran. Penanganan masalah kawasan kumuh harus dilaksanakan dengan pendekatan terprogram untuk meningkatkan cakupan perencanaan di tingkat permukiman secara signifikan. Beberapa isu perencanaan dan kebijakan daerah yang ada belum menyentuh aspek kemiskinan dan kerentanan daerah. Menggunakan data untuk merancang dan mengelola program pengurangan kemiskinan. Hal ini tidak saja berdampak pada berkurangnya efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menimbulkan bentuk-bentuk baru kemiskinan dan kerentanan bahkan memperburuk kondisi kemiskinan yang ada. Pemahaman instansi terkait tentang unsur penataan ruang dan penanggulangan kemiskinan masih terbatas. Sebagian besar lembaga terkait, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masih menganggap perencanaan daerah dan penanggulangan kemiskinan sektoral sebagai

sesuatu yang berbeda dan memiliki hubungan yang terbatas dengan lembaga aksi sosial seperti Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Dinas Sosial.

b. Saran

Pendekatan Kota Surakarta dalam pengentasan kemiskinan masih berbasis program dan anggaran, sehingga belum secara langsung mempengaruhi rencana tata ruang kota. Memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi dampak negatif dari rencana induk perkotaan dan perubahan kondisi kehidupan masyarakat. Instansi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, harus melakukan beberapa hal: Mekanisme perlindungan bagi masyarakat miskin tepi sungai dan pinggiran harus lebih fokus pada mitigasi risiko bencana, yang berfokus pada antisipasi penurunan keadaan sumber daya alam. (SDA). Di daerah pinggiran kota, lebih fokus pada penataan lahan untuk pemukiman baru dan tersedianya transportasi yang murah dan memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, dkk. 2018. *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia : konsep, target dan strategi implementasi (2nd ed.)*. Unpad Press: Bandung. Diakses dari <https://www.unpad.ac.id/>.
- Azizah, Nurul. 2021. Analisis Distribusi Spasial Kemiskinan Kota Surakarta dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Tahun 2018-2020. Publikasi Ilmiah. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2022. *Tingkat Kemiskinan Maret 2022 Menurun di Tengah Risiko, APBN akan Terus Menjadi Shock Absorber*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia diakses pada 24 Januari 2023 pukul 02.26 WIB dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/>.
- BPS Jawa Tengah. 2021. Jawa Tengah. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2020 dan 2021. Jawa Tengah: BPS Jawa Tengah. Diakses pada 31 Januari 2023 pukul 16.10 WIB dari <https://jateng.bps.go.id/statictable/2022/03/16/2566/>.
- BPS Kota Surakarta. 2021. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa), 2019-2021. Surakarta: BPS Surakarta. Diakses pada 23 Januari 2023 pukul 23.59 WIB dari <https://surakartakota.bps.go.id/>.
- BPS Kota Surakarta. 2022. Surakarta Dalam Angka 2022. Surakarta: BPS Surakarta. Diakses pada 4 November 2022 dari <https://surakartakota.bps.go.id/>.
- Darajati, W. Jusuf. 2017. *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dewi, A. E., Maryono, M., & Warsito, B. 2019. *Implementasi Program Kampung Iklim Di Kota*

- Surakarta. In *Proceding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning* (Vol. 16, No. 1, pp. 221-228).
- Hartono, Y. 2020. *Analisis Program Bantuan Sosial (Survei Pemetaan Tingkat Kepuasan Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Surakarta)*. JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, 2(2), 96-103. Surakarta: Dinas Sosial.
- Keputusan. 2020. Wali Kota Surakarta Nomor 640/69.9 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Surakarta: Kota Surakarta.
- Mahditia, Paramita. 2016. *Dari Surakarta Mendesaian Kota Layak Anak Indonesia*. Yogyakarta: Hunian Rakyat Caritra Yogya.
- Marmujiono, Priyo Slamet. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Tahun 2009-2011*. *Economic Development Analysis Journal*, 25-38.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: Jakarta, Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta. 2021. *Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026*: Kota Surakarta.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta. 2021. *Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2021-2041*. Kota Surakarta.
- Rustanto, B. 2015. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sambodo, Prio dkk. 2012. *Mengintegrasikan Aspek Spasial Kemiskinan ke dalam Perencanaan Spasial Perkotaan: Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan Perkotaan*. Lembaga Penelitian SEMERU. No.1. Diakses pada 31 Januari 2023 Pukul 17.57 WIB dari http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/urbanpoverty_pb_ind_0.pdf.
- Setianingtiyas, Retno dkk. 2019. *PEMODELAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA*. LIPI Bandung. Vol. 27 No. 2. Diakses pada 2 Februari 2023 Pukul 01.01 WIB dari <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/323>.
- Syarini, Reiza. 2017. *Karakteristik Tata Kelola Adaptif Desa PROKLIM (Program Desa Iklim) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2022. *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025: Jakarta, Indonesia.